



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF KARYADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 419731

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
2. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	271.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000		
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.913.966
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	638.913.966
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	638.913.966

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOTOK TRI HARIANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **638997**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	620.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	224.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 VELOZ MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. MOTOR, HONDA STYLO MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. MOTOR, SCOOPY RODA DUA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	76.850.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	59.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	979.850.000
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	879.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSUMA ADI ACHMAD
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 743559

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/182 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 825.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/68 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	151.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2016, LAINNYA Rp. 11.000.000		
2. MOBIL, HONDA MOBILIO TIPE E Tahun 2016, LAINNYA Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	5.007.800
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.554.306
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.875.262.106
III. HUTANG	Rp.	282.735.320
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.592.526.786

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURCHADHIRIN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **743571**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	109.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 A/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 1 KP A/T 113CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000		
4. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	103.035.929
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	462.035.929
III. HUTANG	Rp.	111.987.550
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	350.048.379

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.